

SALINAN  
NOMOR 23 / 2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
  14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155)
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) Dan /Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 91 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	367.781.074.000,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.085.498.711.052,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	369.103.076.010,09	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.		1.822.382.861.062,09

## 2. Belanja Daerah:

## a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	852.058.902.164,19	
2) Belanja Hibah	Rp.	115.474.412.951,60	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	12.819.760.000,00	
4) Belanja Tidak Terduga	Rp.	74.854.994.635,37	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.055.208.069.751,16

## b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	175.404.734.885,40	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	707.722.310.641,50	
3) Belanja Modal	Rp.	378.862.169.354,94	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		1.261.989.214.881,84
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp.		2.317.197.284.633,00
Defisit setelah Perubahan	Rp.		(494.814.423.570,91)

## 3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	528.652.087.447,91	
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	33.837.663.877,00	
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.		494.814.423.570,91
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.		0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran IA diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Juli 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 Juli 2020

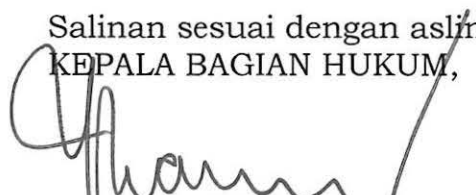
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
TABRANI, SH. M. Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 1990 1 019

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
APBD TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,289,322,092,017.09</b>	<b>1,822,382,861,062.09</b>	<b>(466,939,230,955.00)</b>	<b>(20.39)</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>731,100,229,507.00</b>	<b>367,781,074,000.00</b>	<b>(363,319,155,507.00)</b>	<b>(49.69)</b>
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	272,163,240,082.00	(348,889,896,967.00)	(56.17)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	45,724,817,200.00	38,505,137,058.00	(7,219,680,142.00)	(15.78)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30,130,277,258.00	22,920,698,860.00	(7,209,578,398.00)	(23.92)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,191,998,000.00	34,191,998,000.00	0.00	0.00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,224,050,117,000.00</b>	<b>1,085,498,711,052.00</b>	<b>(138,551,405,948.00)</b>	<b>(11.31)</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	114,205,003,000.00	107,143,605,000.00	(7,061,398,000.00)	(6.18)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	898,383,132,000.00	810,812,876,000.00	(87,570,256,000.00)	(9.74)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	211,461,982,000.00	167,542,230,052.00	(43,919,751,948.00)	(20.76)
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>334,171,745,510.09</b>	<b>369,103,076,010.09</b>	<b>34,931,330,500.00</b>	<b>10.45</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	96,746,600,000.00	102,845,055,500.00	6,098,455,500.00	6.30
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	182,924,766,510.09	182,924,766,510.09	0.00	0.00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51,042,020,000.00	50,374,895,000.00	(667,125,000.00)	(1.30)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3,458,359,000.00	32,958,359,000.00	29,500,000,000.00	853.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2,289,322,092,017.09</b>	<b>1,822,382,861,062.09</b>	<b>(466,939,230,955.00)</b>	<b>(20.40)</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>2,734,109,724,013.69</b>	<b>2,317,197,284,633.00</b>	<b>(416,912,439,380.69)</b>	<b>(15.24)</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1,078,989,860,250.29</b>	<b>1,055,208,069,751.16</b>	<b>(23,781,790,499.13)</b>	<b>(2.20)</b>
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	947,081,464,452.54	852,058,902,164.19	(95,022,562,288.35)	(10.03)
2.1.4	BELANJA HIBAH	116,449,612,951.60	115,474,412,951.60	(975,200,000.00)	(0.83)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12,819,760,000.00	12,819,760,000.00	0.00	0.00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,639,022,846.15	74,854,994,635.37	72,215,971,789.22	2,736.46



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1,655,119,863,763.40</b>	<b>1,261,989,214,881.84</b>	<b>(393,130,648,881.56)</b>	<b>(23.75)</b>
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	188,395,248,642.40	175,404,734,885.40	(12,990,513,757.00)	(6.89)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	838,687,320,039.50	707,722,310,641.50	(130,965,009,398.00)	(15.61)
2.2.3	BELANJA MODAL	628,037,295,081.50	378,862,169,354.94	(249,175,125,726.56)	(39.67)
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2,734,109,724,013.69</b>	<b>2,317,197,284,633.00</b>	<b>(416,912,439,380.69)</b>	<b>(15.25)</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(444,787,631,996.60)</b>	<b>(494,814,423,570.91)</b>	<b>(50,026,791,574.31)</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	484,625,295,873.60	528,652,087,447.91	44,026,791,574.31	9.08
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>484,625,295,873.60</b>	<b>528,652,087,447.91</b>	<b>44,026,791,574.31</b>	<b>9.08</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	(6,000,000,000.00)	(15.06)
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>39,837,663,877.00</b>	<b>33,837,663,877.00</b>	<b>(6,000,000,000.00)</b>	<b>(15.06)</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>444,787,631,996.60</b>	<b>494,814,423,570.91</b>	<b>50,026,791,574.31</b>	<b>11.25</b>
		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>(0.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN I.A  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020

**RINGKASAN PERKODE REKENING PERUBAHAN PENJABARAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	04	PENDAPATAN DAERAH	2,289,322,092,017.09	1,822,382,861,062.09	-466,939,230,955.00
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	731,100,229,507.00	367,781,074,000.00	-363,319,155,507.00
3	040101	Hasil Pajak Daerah	621,053,137,049.00	272,163,240,082.00	-348,889,896,967.00
4	04010101	Pajak Hotel	78,500,000,000.00	20,000,000,000.00	-58,500,000,000.00
5	0401010103	Hotel Bintang Empat	36,357,894,736.84	7,500,000,000.00	-28,857,894,736.84
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	20,657,894,736.84	4,500,000,000.00	-16,157,894,736.84
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	6,941,052,631.58	2,500,000,000.00	-4,441,052,631.58
8	0401010107	Hotel Melati	7,611,709,531.58	2,500,000,000.00	-5,111,709,531.58
9	0401010113	Wisma Pariwisata	495,789,473.68	200,000,000.00	-295,789,473.68
10	0401010115	Guest House	1,239,473,684.22	800,000,000.00	-439,473,684.22
11	0401010116	Rumah Kos	5,196,185,205.26	2,000,000,000.00	-3,196,185,205.26
12	04010102	Pajak Restoran	128,000,000,000.00	35,000,000,000.00	-93,000,000,000.00
13	0401010201	Restoran	65,368,965,138.02	17,500,000,000.00	-47,868,965,138.02
14	0401010202	Rumah Makan	52,251,182,228.09	14,000,000,000.00	-38,251,182,228.09
15	0401010203	Cafeteria	10,379,852,633.89	3,500,000,000.00	-6,879,852,633.89
16	04010103	Pajak Hiburan	20,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-15,000,000,000.00
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	11,562,500,000.00	2,550,000,000.00	-9,012,500,000.00
18	0401010302	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana	1,171,875,000.00	0.00	-1,171,875,000.00
19	0401010305	Pameran	234,375,000.00	170,000,000.00	-64,375,000.00
20	0401010307	Karaoke	3,242,187,500.00	1,000,000,000.00	-2,242,187,500.00
21	0401010315	Permainan Ketangkasan	2,343,750,000.00	1,000,000,000.00	-1,343,750,000.00
22	0401010316	Panti Pijat/Refleksi	546,875,000.00	225,000,000.00	-321,875,000.00

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
788	0601010403	Belanja Barang dan Jasa	7,244,000,000.00	16,383,800,000.00	9,139,800,000.00
789	0601010404	Belanja Modal	10,325,549,386.00	22,622,049,386.00	12,296,500,000.00
790	0601010411	Belanja Tidak Terduga	387,495,333,051.60	387,495,333,051.60	0.00
791	0602	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	-6,000,000,000.00
792	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	-6,000,000,000.00
793	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	-6,000,000,000.00
794	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00
795	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00
796	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	12,337,663,877.00	6,337,663,877.00	-6,000,000,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
 APBD TAHUN ANGGARAN 2020

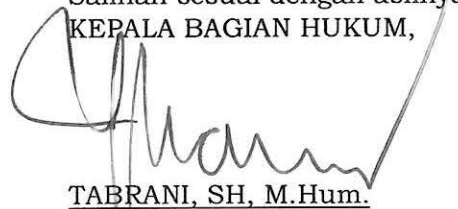
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,  
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan  
 ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN				
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%					
1						2	3	4	5	6	7				
1.02	1.02.01	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00					
1.02	1.02.01	00	00	4	1	Pendapatan Asli Daerah	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00					
1.02	1.02.01	00	00	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00				
1.02	1.02.01	00	00	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00			
1.02	1.02.01	00	00	4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00		
1.02	1.02.01	00	00	4	2	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.02	1.02.01	00	00	4	3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00					
PENDAPATAN DAERAH							300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00					
1.02	1.02.01	00	00	5		BELANJA									
1.02	1.02.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	77,189,993,350.28	68,568,224,670.00	(8,621,768,680.28)	(11.16)					
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	BELANJA PEGAWAI	77,189,993,350.28	68,568,224,670.00	(8,621,768,680.28)	(11.16)				
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	42,213,056,550.00	45,004,029,350.00	2,790,972,800.00	6.61			
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	33,341,305,800.00	35,646,576,000.00	2,305,270,200.00	6.91		
1.02											Pembayaran Gaji Pegawai + (Gaji 13 dan 14)	1.00	Thn	35,646,576,000.00	35,646,576,000.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	2,756,768,500.00	2,936,920,000.00	180,151,500.00	6.53		
1.02											Tunjangan Keluarga	1.00	Thn	2,936,920,000.00	2,936,920,000.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	421,809,600.00	323,878,500.00	(97,931,100.00)	(23.21)		
1.02											Pembayaran Tunjangan Jabatan	1.00	Thn	323,878,500.00	323,878,500.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	3,056,571,100.00	3,479,503,500.00	422,932,400.00	13.83		
1.02											Pembayaran Tunjangan Fungsional	1.00	Thn	3,479,503,500.00	3,479,503,500.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	607,804,700.00	485,743,500.00	(122,061,200.00)	(20.08)		
1.02											Tunjangan Fungsional Umum	1.00	Thn	485,743,500.00	485,743,500.00
1.02	1.02.01	00	00	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	2,017,255,500.00	2,018,595,250.00	1,339,750.00	0.06		
1.02											Tunjangan Beras	1.00	Thn	2,018,595,250.00	2,018,595,250.00

KODE REKENING								URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5	6	7
3.02	3.02.0101	00	00	6	1	1		Belanja Pegawai dari Belanja langsung	4,431,592,000.00	7,021,592,000.00	2,590,000,000.00	58.44	
3.02	3.02.0101	00	00	6	1	1		Belanja Barang dan Jasa	7,244,000,000.00	16,383,800,000.00	9,139,800,000.00	126.17	
3.02	3.02.0101	00	00	6	1	1		Belanja Modal	10,325,549,386.00	22,622,049,386.00	12,296,500,000.00	119.08	
3.02	3.02.0101	00	00	6	1	1		Belanja Tidak Terduga	387,495,333,051.60	387,495,333,051.60	0.00	0.00	
<b>3.02</b>	<b>3.02.0101</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>			<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>39,837,663,877.00</b>	<b>33,837,663,877.00</b>	<b>(6,000,000,000.00)</b>	<b>(15.06)</b>	
3.02	3.02.0101	00	00	6	2	2		Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	(6,000,000,000.00)	(15.06)	
3.02	3.02.0101	00	00	6	2	2		Badan usaha milik daerah (BUMD)	39,837,663,877.00	33,837,663,877.00	(6,000,000,000.00)	(15.06)	
3.02	3.02.0101	00	00	6	2	2		Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	
3.02	3.02.0101	00	00	6	2	2		Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	0.00	0.00	
3.02	3.02.0101	00	00	6	2	2		Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	12,337,663,877.00	6,337,663,877.00	(6,000,000,000.00)	(48.63)	
<b>Pembiayaan Netto</b>									<b>444,787,631,996.60</b>	<b>494,814,423,570.91</b>	<b>50,026,791,574.31</b>	<b>11.25</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI